

## MASALAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN JAWA TENGAH

### *PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF SMALL SCALE BUSINESSES OR INDUSTRIES LOANS PROGRAM IN THE PROVINCES OF SOUTH SULAWESI AND CENTRAL JAVA*

**Mandala Harefa**

(Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi/P3DI  
Sekretariat Jenderal DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;  
email: mandnias@yahoo.com)

Naskah Diterima: 21 Oktober 2015, direvisi: 2 November 2015,  
disetujui: 10 Desember 2015

#### **Abstract**

*Loans for small scale industries (KUR) is a government policy to help people in the region develop their small scale industries or businesses in Indonesia, include in the provinces of South Sulawesi and Central Java. In this case, the KUR management there are conducted by banks appointed by the central government. Findings of this research shows that the implementation of KUR policy in the two provinces is hampering problems in determining criteria of industries or business which deserves for the loans, as well as their productivity, and also capability to develop their businesses and market network, and so forth. The research was conducted by adopting a qualitative approach, using a descriptive-analytical method. South Sulawesi and Central Java provinces have been purposively chosen as samples. The findings more specifically show that criteria made by the appointed banks is a main constraint for small scale industries' access to KUR, and if they will confront higher risks and uncertainties, their access to it would be more difficult. Apart from this, their ability to deal with financial matters, which is still not well, which will implicate their ability to return the KUR they received has been also considered and constrained their access to it.*

**Keywords:** *small scale loans, KUR, small scale businesses, South Sulawesi, Central Java.*

#### **Abstrak**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha skala kecil di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Manajemen KUR dilaksanakan lembaga perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menilai bahwa dalam implementasi kebijakan KUR di kedua provinsi masih terdapat beberapa permasalahan dalam kriteria usaha kecil yang dapat memperoleh KUR; penilaian kelayakan usaha kecil yang produktif; kemampuan usaha kecil mengembangkan usahanya; jaringan pemasaran produk usaha kecil, dan lain-lain. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah dipilih secara sengaja sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh KUR. Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Di samping itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.

**Kata kunci:** kredit usaha rakyat, KUR, usaha kecil, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, struktur kegiatan usaha umumnya terdiri dari: skala besar, menengah, dan kecil. Masing-masing skala usaha tersebut memiliki karakteristik dan permasalahannya sendiri. Dalam mengembangkan usaha kecil sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan seperti permodalan dan pemasaran produk. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik melalui regulasi, pendanaan, serta lembaga pembina setingkat kementerian untuk merevitalisasi

kegiatan usaha kecil tersebut agar dapat lebih berperan dalam perekonomian.

Selama ini permasalahan yang dikemukakan berbagai kalangan bahwa masalah usaha kecil selalu berkaitan dengan sulitnya memperoleh modal. Padahal program pemberdayaan usaha kecil melalui aspek permodalan telah ada sejak tahun 1970-an. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program promosi yang secara langsung bertujuan membantu usaha kecil, termasuk program kredit bersubsidi (Program KIK/KMKP), program kredit bersubsidi yang ditujukan untuk usaha kecil (KUK), dan program

bantuan teknis (Program BIPIK dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Departemen Perindustrian dan Perdagangan).<sup>1</sup>

Selanjutnya program Kredit Usaha Kecil (KUK—era pemerintahan Orde Baru menggantikan program KIK dan KMKP tahun 1980-an) sebagai program utama untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil, namun tidak membawa hasil yang diharapkan karena bank komersil diwajibkan untuk menyalurkan sedikitnya 20% dari *portfolio* pinjaman mereka. Apabila perbankan tidak berhasil mencapai target 20%, maka bank akan mendapat penalti. Kebijakan pengaturan jumlah dan arah pemberian kredit dalam tahun 1980-an tersebut terutama ditandai oleh langkah untuk memberi kelonggaran persyaratan kredit dalam program pemerintah untuk meningkatkan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah. Kelonggaran persyaratan kredit ini yang pada dasarnya diatur dalam Keppres dengan memberikan kepada kontraktor/rekanan yang memperoleh kontrak pemborong pekerjaan atau kontrak pembelian Pemerintah. Selain itu juga disediakan dana Kredit Mini dan Kredit Midi dalam rangka membantu para pedagang kecil di pasar-pasar juga telah dilanjutkan fasilitas Kredit Candak Kulak (KCK) yang diberikan untuk menunjang pengembangan pengusaha-pengusaha kecil pribumi.

Dalam perjalanannya program pemberdayaan (promosi) usaha kecil ini kurang maksimal dan optimal. Dampaknya pada era tahun 1990-an digantikan dengan program Bapak Angkat Mitra Usaha-Bapak Angkat, Anak Angkat pada 1992. Meskipun awal 1992 dicanangkan sebagai suatu gerakan nasional, program bapak-angkat untuk pengembangan usaha kecil ini juga kurang berhasil. Ketidakterhasilan program ini karena pada dasarnya program ini mewajibkan usaha besar (termasuk usaha swasta maupun BUMN) untuk membantu usaha kecil dalam berbagai bidang seperti pendanaan, pemasaran, dan pelatihan manajemen, dimana program ini tidak menunjukkan adanya kepentingan usaha besar. Jadi sama dengan program KUK, program bapak angkat ini juga merupakan program yang dipaksakan pemerintah sehingga tidak berhasil mencapai tujuannya.

Pada pemerintahan era tahun 2000-an hingga saat ini, kebijakan pemerintah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak upaya dan langkah-langkah yang menyangkut pemberdayaan bagi usaha kecil, dimana pemerintah memiliki komitmen yang tinggi membantu usaha

kecil baik menyangkut peningkatan SDM, maupun akses pasar dan permodalan. Bagi usaha kecil dan menengah, kredit usaha dirasa cukup penting dalam meningkatkan kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dalam menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal dalam mengembangkan usaha lebih maju. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi usaha kecil dan koperasi, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR, diharapkan pelaku usaha kecil memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya.

Pada era Presiden SBY<sup>2</sup> sejak 2007 mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya peningkatan akses usaha kecil ke perbankan dengan skema penjaminan. Tujuannya adalah memudahkan akses usaha kecil kepada sumber pembiayaan khususnya perbankan. Penyaluran KUR ditujukan untuk mendukung penyediaan modal kerja dan/atau investasi bagi usaha kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang layak (*feasible*) namun belum *bankable*. Pengertian belum *bankable* disini adalah para usaha kecil yang belum pernah atau belum terbiasa berhubungan dengan perbankan. Selama ini mereka memperoleh pinjaman dari non bank atau dengan rentenir dengan tingkat bunga yang melebihi tingkat bunga bank. Jadi permasalahan para usaha kecil sebenarnya bukan pada tingkat bunga yang tinggi, tapi pada akses ke perbankan.

Dari laporan Komite KUR bahwa hingga Desember 2012, bank nasional yang menyalurkan KUR sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafon mencapai Rp59,2 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafonnya sebesar Rp12,6 triliun dan Rp46,6 triliun, debiturnya 79.084 UKM dan 7.057.766 UKM, rata-rata kredit Rp159,7 juta/debitur dan Rp6,6 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,1% dan 1,7%. Menduduki peringkat kedua yaitu Bank Mandiri dengan total plafon sebesar Rp10,79 triliun, debiturnya sebanyak 210.453 UKM, dengan rata-rata kredit Rp51,3 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 2,0%. Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafon sebesar Rp10,67 triliun, debiturnya sebanyak 153.050 UMK, dengan rata-rata kredit Rp69,8 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 7,3%.

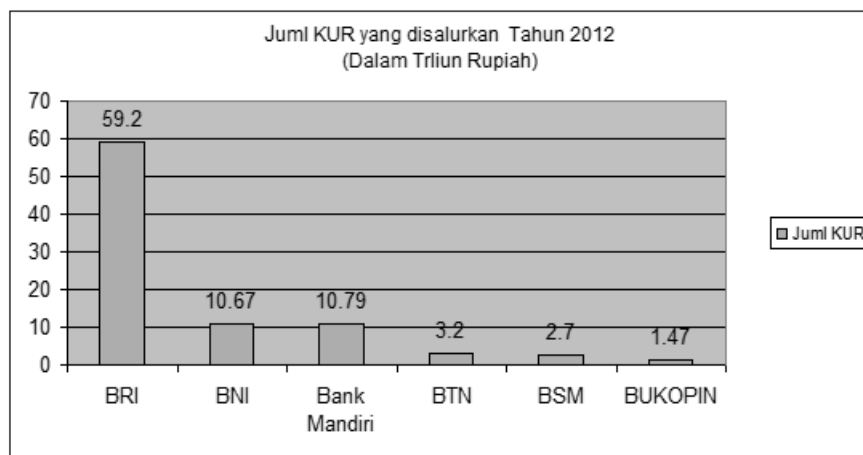
<sup>1</sup> Thee Kian Wie, "Perkembangan dan Kebijakan Usaha Kecil dan menengah di negara-negara Asia Timur dan Relevansinya bagi Indonesia". *Makalah Ilmiah pada PDII LIPI*, 2011, hal 14 -15

<sup>2</sup> Ibnu Purna, 2012, KUR Tumbuh Positif, Namun Masih Timpang, (*online*), (<http://www.setkab.go.id/artikel-5436-.html>, diakses Kamis, 23 Agustus 2012).

Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafon Rp3,2 triliun, BSM dengan plafon Rp2,7 triliun, Bank Bukopin dengan plafon Rp1,47 triliun dan BNI Syariah dengan plafon Rp41,7 miliar. Secara keseluruhan, nilai *Non Performing Loan* (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5%, yaitu sebesar 3,2%. Bank BNI merupakan Bank Pelaksana dengan nilai NPL terbesar dalam penyaluran KUR yaitu sebesar 7,3%, dan BRI (KUR Mikro) dengan NPL terkecil yaitu 1,7%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyaluran kredit termasuk KUR tepat sasaran.<sup>3</sup> (lihat Gambar 1.)

jumlah UKM berdasarkan publikasi Kementerian Koordinator Perekonomian RI, jumlah pelaku UMKM sebanyak 51,3 juta unit usaha atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerjanya mencapai 90,9 juta pekerja atau sebanding dengan 97,1 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Ironisnya 50% usaha kecil masih belum tersentuh jasa perbankan. Padahal, masalah mendasar usaha kecil adalah modal usaha.<sup>5</sup> Kondisi terkait masih lemahnya dalam pendataan UMKM yang akan menerima ataupun yang sudah menerima Kredit Usaha Rakyat yang benar-benar layak mendapatkan KUR, sehingga tidak terjadi

**Gambar 1.** Perkembangan Jumlah KUR yang Disalurkan Tahun 2012



Sumber: Komite KUR, 2013.

Dari jumlah kredit yang disalurkan tersebut, sampai akhir 2012 jumlah UMKM yang didampingi mengakses KUR ke Bank Pelaksana oleh tenaga Pendamping Koperasi berjumlah 29.135 UMKM, dan telah berhasil memperoleh KUR dari Bank Pelaksana sebanyak 1.645 UKM, dengan nilai kredit sebesar Rp67.472.000.000. Secara kumulatif realisasi penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana sampai dengan 31 Desember 2012 telah mencapai Rp97,6 trilliun kepada 7,6 juta usaha kecil. Hal ini berarti bahwa minimal sebanyak 7,6 juta UMKM telah mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya, baik berupa modal kerja maupun kredit investasi.<sup>4</sup>

Artinya masih banyak usaha kecil yang belum memperoleh fasilitas KUR, bila melihat data

penyalahgunaan manfaat, tujuan, dan sasaran diberikannya Kredit Usaha Rakyat.<sup>6</sup>

Hal ini terjadi mengingat dalam pelaksanaan program KUR masih menghadapi berbagai kendala klasik seperti belum adanya pemahaman yang seragam terhadap KUR, baik oleh petugas bank di lapangan maupun masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Dari persyaratan yang ada bahwa yang berhak mendapatkan KUR adalah debitur usaha kecil baru. Hal ini tentunya sama sekali menyulitkan Bank Pelaksana dalam mendapatkan calon debitur dan ekspansi kredit. Implikasinya masih banyak dana yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini makin menambah permasalahan dengan tidak semua bank pelaksana KUR membuka kantor

<sup>3</sup> Komite KUR, 2013, Sebaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Periode November 2007- Desember 2012, (*online*), (<http://komite-kur.com/article-71-.asp>, diakses tanggal 28 Maret 2013).

<sup>4</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2013, Program KUR Lampau Target Kemenkop dan UKM Lakukan Pendampingan 430 Koperasi Seluruh Indonesia, (*online*), ([http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1224:program-kur-lampau-target-kemenkop-dan-ukm-lakukan](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kur-lampau-target-kemenkop-dan-ukm-lakukan), diakses 13 February 2013)

<sup>5</sup> Kementerian Perdagangan, 2013, UMKM: Pilar Fundamental Perekonomian Nasional, (*online*) (<http://ditjenpdn.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/kolom-anda/50>, diakses tanggal 5 April 2013)

<sup>6</sup> I Gusti Agung Alit Semara Putra dan I A. Nyoman Saskara, "Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar", *E-Jurnal EP Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2013, hal 467.

cabang atau dapat melayani debitur untuk daerah pada tingkat pemerintah tingkat II. Terutama daerah-daerah yang secara ekonomis tidak menguntungkan untuk membuka cabang. Demikian pula untuk tenaga-tenaga *Account Officer* perbankan yang sangat terbatas dalam mensosialisasikan program KUR, dimana tenaga pegawai yang menangani KUR tidak dapat dilakukan seketika. Selain itu permasalahan prosedur dalam mengakses KUR masih dialami pelaku usaha kecil yang notabene merupakan target utama program tersebut. Hal ini terjadi semua tugas yang dibebankan kepada petugas lapangan juga banyak mulai dari pemasaran KUR Mikro, analisis kredit, hingga penagihan.<sup>7</sup>

Namun demikian di sisi lain apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada usaha kecil karena walaupun usaha kecil telah dikategorikan *feasible*, namun belum bankable. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara *international best practices* (Basel 2) yang tidak cocok dengan kondisi usaha kecil khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Paparan di atas menggambarkan bahwa program KUR yang bertujuan mempermudah UKM untuk mengatasi masalah permodalan belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan. Implementasi program KUR yang telah berjalan sejak tahun 2007 tentunya akan sangat bergantung pada sejauh mana program yang telah dirancang dapat diakses seluruh UKM hingga seluruh daerah. Dengan melihat gambaran jumlah KUR yang telah disalurkan belum seutuhnya menggambarkan bahwa usaha kecil dengan mudah memperoleh atau mengakses kredit tersebut. Bahkan masih banyak usaha kecil belum memperoleh KUR tersebut dengan berbagai permasalahan seperti yang dikemukakan di atas. Dengan dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisa dengan judul: "Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat". Dari permasalahan tersebut yang akan menjadi pertanyaan penelitian antara lain: 1) Bagaimana implementasi program kredit usaha rakyat (KUR) yang telah berjalan selama ini di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah; dan 2) Permasalahan apa yang dihadapi oleh lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR serta Usaha kecil dan menengah dalam mengakses kredit usaha rakyat?

<sup>7</sup> Rurun Andika Soviana, "Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Edisi I Tahun 2012, hal. 15.

## C. Tujuan Penulisan

Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan KUR melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Kecil. Kebijakan diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara departemen teknis perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada usaha kecil. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai instansi baik SKPD yang terkait, Asosiasi usaha kecil dan perbankan. Selama berjalannya kebijakan tersebut masih banyak kendala dimana masih banyak kesulitan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR serta sisi usaha kecil dalam memperoleh akses kredit tersebut. Tujuan penulisan: a) Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana implementasi program KUR pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah; b) Mengetahui faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR dalam mengakses kredit usaha rakyat.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Fungsi Kredit

Dalam kegiatan ekonomi baik industri dan perdagangan baik itu usaha besar dan kecil, aspek modal merupakan bagian yang terpenting terutama dalam pengembangan usaha. Secara umum biasanya modal bisa berasal dari modal sendiri seperti barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja atau meminjam dari pihak atau lembaga lain. Pinjaman dari lembaga perbankan seperti yang sangat umum dikenal pada saat ini adalah kredit. Menurut Gilarso kredit merupakan pemberian uang, barang atau jasa kepada pihak lain, tanpa menerima imbalan (pembayaran) langsung atau bersamaan tetapi dengan percaya bahwa pihak yang menerima uang atau barang tersebut akan mengembalikan atau melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Pengertian kredit juga telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan Teguh Pudjo Muljono

<sup>8</sup> Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992, hal. 246.

menjelaskan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>9</sup> Dari pemahaman-pemahaman tersebut maka kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apa-apa yang telah disepakati, apakah itu berupa barang, uang, maupun jasa.

Dalam menjalankan tujuan kredit tersebut dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu: a) Kredit Komersial (*commercial loan*), kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil meliputi antara lain: kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya; b) Kredit Konsumtif (*consumer loan*), adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya; dan c) Kredit Produktif: yaitu jenis kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi dan sebagainya.<sup>10</sup>

Bila melihat dari sisi kegunaannya atau manfaat kredit dapat dilihat dari segi kegunaannya tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kredit investasi merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan

baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

## 2. Kelembagaan dan Prinsip Kredit

Dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat dipercaya dimana berfungsi menyalurkan pinjaman atau kredit yang membutuhkan sesuai dengan dengan persyaratan. Lembaga yang selama ini masyarakat kenal adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>12</sup>

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan selain itu tentunya menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan spesifik seperti yang diungkapkan oleh Sri Susilo, S. Triandaru, dan A. Santoso, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. *Agent of Trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan dari masyarakat.
2. *Agent of Development*. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
3. *Agent of Service*. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

Dengan demikian lembaga perbankan merupakan institusi yang sangat berperan dalam perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan

<sup>9</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial* (Cetakan Ke-3), Yogyakarta: BPFE, 2001, hal. 9.

<sup>10</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Edisi ke 2), Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1999, hal. 108.

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 109.

<sup>12</sup> Thomas Suyatno dkk., 1988, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000, hal. 7.

<sup>13</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budi santoso. *Bank dan lembaga Keuangan lainnya* (Edisi 2), Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 13.

dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Untuk itu dalam pelaksanaan penyaluran kredit yang dikelola oleh pihak bank selalu berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dijalankan dalam rangka meminimalkan *non-performing loan* atau kredit macet sebelum suatu fasilitas kredit diberikan. Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali dengan metode pengenalan debitur terlebih dahulu. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas:<sup>14</sup>

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Dengan kondisi dan persyaratan yang diberlakukan oleh perbankan tentunya sangat menyulitkan nasabah skala kecil dalam mengakses kredit. Padahal bila menurut Halim Alamsyah, dkk di negara-negara seperti Indonesia peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan, karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank lebih superior dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi informasi yang asimetris dan mahal biaya dalam melakukan fungsi intermediasi. Secara

alami bank mampu melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam.<sup>15</sup>

Dengan demikian dalam upaya meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, pemerintah membutuhkan tentunya sangat lembaga keuangan dan lembaga penjaminan dalam rangka menjalankan kebijakan yang terkait untuk penyaluran kredit yang diperuntukkan bagi usaha dan kecil yang membutuhkan modal. Melalui kebijakan KUR-fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan usaha kecil yang cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup yang tentunya tetap dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Sedangkan konsep KUR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada usaha kecil yang memenuhi persyaratan (*feasible*) tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha kecil yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung diakses usaha kecil ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage program* lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.<sup>16</sup>

Kebijakan KUR merupakan upaya Pemerintah mendorong lembaga perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada usaha kecil. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT.Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

<sup>14</sup> Kasmir, Op,Cit, hal 92

<sup>15</sup> Halim Alamsyah, dkk, "Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Maret, 2005, hal. 499 - 521

<sup>16</sup> Komite KUR, Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat, (*online*), ([http://komite-kur.com/maksud\\_tujuan.asp](http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp), diakses tanggal 25 Maret 2013).

Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar – Rp50 miliar.<sup>17</sup> Secara detail dapat di lihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Berdasarkan Proporsi Jumlah

No. URAIAN	KRITERIA		Jumlah Per tahun 2008	Presentase (%)
	ASSET	OMZET		
USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta	52,2 juta	98,88
USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar	546,7 ribu	1,04
USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar	41 ribu	0,08
BESAR	> Rp 10 miliar	> Rp 50 miliar	4,7 ribu	0,01

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan data dari Badan Pusat Statistik (2009).

usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Kriteria UKM yang berhak menerima KUR berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) Pasal 1 angka (1), (2), dan (3), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Usaha Kecil dan Menengah tersebut.

Sedangkan kriteria UMKM telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3). Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif-analisis yakni menjelaskan dan menganalisis tentang permasalahan berkaitan dengan program dan pelaksanaan penyaluran KUR bagi usaha kecil untuk meningkatkan kegiatan usaha yang kesulitan dalam mengakses kredit. Penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala implementasi kebijakan terkait akses terhadap KUR dengan menganalisis data primer dan sekunder. Dari hasil analisis deskriptif dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi dalam perbaikan kebijakan dan program terkait KUR.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data-data yang digunakan sebagian besar bersumber dari data sekunder dan primer. Data sekunder akan dikompilasi dari literatur dan sumber lainnya seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan internet serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KUR. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dibantu pedoman wawancara terhadap instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Industri dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi, Universitas Negeri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Cabang bank penyalur KUR: BRI, BPD, Kantor Cabang PT.ASKRINDO dan PT.JAMKRINDO, Asosiasi UMKM yang merupakan objek utama program KUR.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengolahan dan penganalisaan data

<sup>17</sup> Lebih lengkap lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung melalui wawancara mendalam secara partisipatif dari penelitian. Dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian. Dari data-data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar maupun internet akan digunakan sebagai bahan penting untuk memberi gambaran kondisi serta gejala-gejala yang berkembang pada permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan informasi penting yang dihasilkan melalui wawancara dan FGD akan dimanfaatkan dengan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya guna mencari inti masalah untuk memudahkan dalam menganalisis. Data-data yang diperoleh akan dimanfaatkan guna mendukung dalam memenuhi tujuan dari penelitian selain itu data akan sangat bermanfaat sebagai mempertajam analisis untuk melihat gejala-gejala atau permasalahan yang timbul pada saat kebijakan dilaksanakan.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah pada bulan Juli dan Agustus/September 2013. Pemilihan kedua provinsi tersebut yakni adanya perbedaan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyalur KUR dan karakteristik UKM serta kelembagaan penyokong pendanaannya. Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa berdasarkan laporan dari bank-bank pelaksana kepada Kantor Bank Indonesia Semarang, realisasi plafon kredit KUR hingga triwulan II 2008 sebesar Rp759 miliar, baki debit sebesar Rp707 miliar, dan jumlah debitur sebanyak 91.543. Dengan melihat jumlah kredit maupun debitur tersebut, rata-rata kredit yang diberikan oleh bank-bank tersebut sebesar Rp8,3 juta per-nasabah. Data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyebutkan bahwa penyaluran KUR Jawa Tengah sebesar Rp1,154 triliun, dengan jumlah debitur 194.863. Dibandingkan dengan penyaluran KUR oleh provinsi-provinsi lainnya, Jawa Tengah menduduki urutan pertama. Di Jawa Tengah, penyaluran kredit terbanyak disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp489 miliar (65% dari total penyaluran KUR triwulan II/2008).<sup>18</sup>

Sedangkan pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berhasil merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp14 triliun selama April 2013, naik Rp2 miliar dari bulan sebelumnya hanya Rp13,8 triliun. Berdasarkan sektor yang dibiayai, selama April kredit paling besar di serap untuk unit jasa dan perdagangan dengan nilai Rp10,632 triliun atau mencapai 75,77% dari total pembiayaan delapan sektor yang ada. Jumlah itu, menurun dari periode pembiayaan Maret yang mencapai Rp10,463 atau sebesar 75,82% dari total kredit yang di keluarkan lembaga keuangan pemberi kredit. Selain jasa dan perdagangan, tujuh sektor lain yang mendapatkan KUR meliputi industri dan pertambangan/pengolahan senilai Rp394 miliar, agribisnis sebesar Rp1,18 triliun, listrik gas dan air Rp1,13 miliar, bangunan Rp46 miliar, pengangkutan dan komunikasi Rp18 miliar, jasa-jasa Rp371 miliar dan sektor ekonomi lainnya mencapai Rp1,38 triliun. Dengan jumlah KUR senilai Rp14 triliun itu di salurkan kepada 1,7 juta unit usaha yang tersebar di berbagai daerah dan tercatat jumlah terbesar penyerap KUR pada sektor jasa dan perdagangan. Jumlah UMKM penerima KUR selama periode April bertambah sebanyak 19.367 unit menjadi 1.734.453 usaha dari bulan sebelumnya hanya 1.715.086. Pembiayaan kedelapan sektor UMKM di Jateng di dukung oleh tujuh perbankan terdiri Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Jateng. BRI tercatat paling besar menyalurkan KUR tersebut mencapai senilai Rp10 triliun dengan jumlah nasabah untuk 1,6 juta UMKM.<sup>19</sup>

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sulawesi Selatan

#### 1. Kondisi Perekonomian

Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan naik dari 6,20 persen menjadi 8,18 persen akibat meningkatnya nilai ekspor khususnya sektor pertambangan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,53 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan semakin baiknya pertambahan nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Secara lebih terinci dapat dilihat pada penggunaan nilai PDRB. Penggunaan

<sup>18</sup> Bank Indonesia, 2009, Perkembangan KUR, (*online*), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F6118BA1-4302-4BE9-B1F6-7A09EF39137B/14298/Boks2PerkembanganKUR.pdf>), diakses tanggal 25 Maret 2013)

<sup>19</sup> Bisnis Jateng, 2013, Jateng: Selama April 2013 Realisasikan KUR Rp14 Triliun, (*online*), (<http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/05/kur-jateng-jateng-selama-april-2013-realisasikan-kur-rp14-triliun/>), diakses tanggal 18 Juli 2013)

PDRB tahun 2010 yang terbesar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp59.616,78 miliar, ekspor Rp36.674,89 miliar, dan impor Rp36.426,09 miliar, konsumsi pemerintah Rp32.627,34 miliar, investasi sebesar Rp27.921,35 miliar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekitar 80 persen PDRB Sulawesi Selatan 2010 digunakan untuk konsumsi, dimana hal ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi.<sup>20</sup>

dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang usaha pertanian ke bidang usaha industri, khususnya industri pengolahan. Struktur perekonomian provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun (*yoy*) memperlihatkan sedikit pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan.<sup>21</sup>

**Tabel 2.** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Tahun 2009-2012 dan Triwulan I-2013 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2009		2010		2011		2012		2013	
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
1. Pertanian	28,008.2	28%	30,442.4	2,3%	34,788.2	6,5%	39,518.4	5,4%	44.162,54	4,0%
2. Pertambangan dan Penggalian	5,503.8	6%	7,119.7	15,7%	8,345.8	-7,9%	8,803.0	4,4%	11.063,89	9,3%
3. Industri Pengolahan	12,514.9	13%	14,457.3	6,2%	16,789.3	7,6%	19,492.5	8,9%	22.559,13	8,1%
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	949.2	1%	1,088.0	8,0%	1,245.9	8,6%	1,439.2	12,5%	1.661,40	8,4%
5. Konstruksi / Bangunan	5,387.8	6%	6,534.5	9,2%	7,760.9	12,1%	9,109.8	9,7%	10.788,20	10,9%
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,690.3	17%	20,435.0	11,6%	24,236.3	10,9%	28,349.6	10,5%	33.031,58	9,4%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,954.0	8%	9,445.6	14,8%	10,849.8	12,1%	12,982.9	14,9%	14.867,28	8,9%
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,241.5	7%	7,810.1	16,8%	9,513.7	14,8%	11,803.3	15,9%	14.584,81	14,2%
9. Jasa-jasa	16,704.9	17%	20,529.7	4,3%	23,859.8	6,7%	27,928.4	2,3%	32.064,22	3,7%
PDRB	99,954.6	100%	117,862.2	100%	137,389.8	100%	159,427.1	100%	184.783,06	100%

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi, Tahun 2013.

Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 meningkat dari sekitar Rp99,954 Triliun tahun 2009 menjadi Rp117,83 Triliun, dengan kontribusi sektor pertanian menurun dari 29,45 menjadi 27,98 persen sementara oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel naik 0,37 persen menjadi 16,71 persen. Secara umum pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan PDRB nasional. Dari aspek penawaran, karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan PDRB adalah pergerakan perubahan struktur ekonomi yang signifikan dengan penambahan nilai setiap sektor pembangunan. Komponen utama

## 2. Kondisi dan Pengembangan Usaha Kecil

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil diarahkan pada beberapa kebijakan antara lain mengembangkan sistem dan kelembagaan pendukung pembinaan usaha kecil dan menengah dimana hal ini dapat menciptakan keterpaduan antar unit kerja terkait. Memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional. Melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan yang terkait dengan kegiatan produksi, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan penyediaan modal untuk pengembangan usaha. Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat sangat menentukan pengembangan dan pemberdayaan

<sup>20</sup> Jawaban Tertulis dari hasil wawancara penelitian dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>21</sup> *Ibid.*

pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang dalam berbagai hal mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan.

Kelembagaan ekonomi masyarakat tidak hanya menyangkut organisasi pengembangan usaha, akan tetapi juga meliputi ketersediaan regulasi yang mendukung dan tatacara dalam melakukan/ manajemen usaha guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia usaha. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasaran. Dalam proses membangun keberadaan kelembagaan ekonomi khususnya koperasi dan usaha perorangan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan manajemen usahanya sulit ditingkatkan jika dilakukan sendiri-sendiri. Sebagai contoh dalam pemanfaatan peralatan teknologi pertanian, pengelolaan sentra-sentra industri kecil, strategi pemasaran, penguatan kelembagaan ekonomi dengan memperbaiki tata niaga, akses terhadap permodalan yang semuanya hanya dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan satu dengan lainnya.

- Meningkatkan Skim Kredit bagi petani dan nelayan (mendirikan Koperasi BPR 27 Unit) di Kab/Kota yang potensial pengembangan.
- Membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha.
- Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam majemem pengelolaan usaha.
- Pengembangan Koperasi Wanita yang mandiri dan berbadan hukum.
- Meningkatnya jumlah UMKM yang layak perbankan, dan berkembangnya lembaga penjamin kredit.
- Meningkatnya Nilai Kredit yang tersalur dari lembaga keuangan kepada Koperasi dan UMKM.
- Tersedianya regulasi yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Perkembangan Jumlah UMKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2008 jumlah UMKM sebesar 801.947 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 916.232, atau meningkat sebesar 99.616 (atau 12 persen), lihat tabel di bawah.

**Tabel 3.** Jumlah UKM Non BPR/LKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

URAIAN	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah seluruh UMKM	788.024	824.417	860.163	894.163	916.232
Jumlah BPR/LKM	23	22	22	22	22
Jumlah UMKM Non-BPR/LKM	801.947	820.324	856.909	889.396	901.563

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Tahun 2013.

Demikian juga di pedesaan, pengembangan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan dapat menjembatani kebutuhan usaha kecil dan menengah ke lembaga keuangan yang aksesnya sangat terbatas. Pemerintah daerah akan terus mendorong, memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, termasuk koperasi khususnya koperasi wanita, serta usaha mikro kecil dan menengah. Terbangunnya kelembagaan ekonomi yang baik dan kuat akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha. Untuk mencapai hal tersebut beberapa sasaran pokok yang perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan untuk mencapai indikator sasaran tahun 2014 antara lain sebagai berikut;

- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM

Persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008, jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 97,22 persen dan tahun 2012 meningkat menjadi 99,26 persen, atau bertambah 2 persen. Dari 3 kategori UMKM, usaha mikro memiliki proporsi yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah usaha kecil. Perbandingannya untuk tahu 2012 usaha mikro berjumlah 797,081 sedangkan usaha kecil hanya sekitar 112.657. (tabel 4.)

### 3. Akses Kredit untuk Usaha Kecil

Bila melihat penyaluran kredit pada Triwulan I-2013, mengalami perlambatan pertumbuhan dari 22,58% (yoy) pada Triwulan II-2013 menjadi 21,84% (yoy) lihat Tabel 5. Dari sisi penggunaannya, kredit konsumsi yang pangsanya terbesar, mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 24,01% dibandingkan laporan periode sebelumnya 24,85% (yoy). Diikuti juga dengan kredit modal kerja yang

**Tabel 4.** Perkembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah usaha mikro	Jml	691,162	723,288	755,292	780,452	797,081
Jumlah usaha kecil	Jml	92,448	96,760	101,205	109,323	112,657
Jumlah UKM	Jml	805,989	824,416	860,810	894,160	916,500
Usaha Mikro dan Kecil	%	97.22	99.47	99.50	99.51	99.26

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan Tahun 2013.

mengalami perlambatan pertumbuhan 9,74% pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 27,43%. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kredit investasi yang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 41,99% pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,51%. Peningkatan kredit investasi terutama terjadi pada sektor listrik, gas, dan air.

sektor perdagangan, sektor jasa dunia usaha dan sektor jasa sosial masyarakat, yaitu menjadi tumbuh sebesar 223,27% (yoy), 28,77% (yoy), 31,52% (yoy), 31,21% (yoy) dan 3,41% (yoy). Sektor yang mengalami pertumbuhan kredit tertinggi adalah sektor listrik-gas, air minum dari 162,55% (yoy) menjadi 223,27% (yoy). Peningkatan pertumbuhan dari sektor-sektor tersebut merupakan dampak dari semakin meningkatnya berbagai kegiatan

**Tabel 5.** Penyaluran Kredit/Pembiayaan Usaha Bank Umum Per Jenis Penggunaan

KOMPONEN	Pertumbuhan (y.o.y) (%)						Nominal (Rp Milyar)					
	2012				2013		2012				2013	
	I	II	III	IV	I	II	I	II	III	IV	I	II
Kredit (lokasi proyek)	26.30	26.32	22.49	22.77	22.58	21.84	58,755	63,265	65,413	69,956	72,019	77,083
- Modal Kerja	30.45	33.23	22.55	28.22	27.43	9.74	22,500	25,045	24,657	28,250	28,671	27,484
- Investasi	28.20	22.23	18.27	5.18	8.51	41.99	11,728	12,256	12,635	11,911	12,725	17,402
- Konsumsil	21.87	22.14	24.44	26.13	24.85	24.01	24,527	25,965	28,121	29,794	30,622	32,197

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

Penurunan kredit pada beberapa sektor utama, menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit. Perlambatan pertumbuhan terjadi di sebagian besar penyaluran sektor-sektor utama dan juga sektor yang bukan termasuk unggulan, seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor lain-lain yang masing-masing melambat sebesar 23,20% (yoy), 6,78% (yoy), 15,42% (yoy) dan 17,51% (yoy) dari 55,44% (yoy), 26,31% (yoy), 21,81% (yoy) dan 18,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Bahkan kredit pada sektor pertambangan mengalami kontraksi, dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh 3,95% (yoy) menjadi terkontraksi 3,97% (yoy). Penurunan dan perlambatan tersebut merupakan dampak dari tekanan yang merupakan kondisi perekonomian dan penurunan nilai jual hasil pertambangan di pasaran dunia walaupun presentase penurunan kecil.

Sementara itu, terjadi peningkatan pertumbuhan kredit di beberapa sektor yaitu sektor listrik gas-air,

parawisata, kegiatan konferensi, dimana kegiatan tersebut berdampak terhadap kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri. Kemudian, satu-satunya sektor yang terkontraksi pertumbuhan kreditnya adalah sektor pertambangan (Tabel 6).

Berdasarkan pangsa, kredit konsumsi merupakan yang terbesar. Kredit konsumsi pada triwulan II-2013 masih tercatat memiliki pangsa yang tertinggi yaitu sebesar 41,77% atau sebesar Rp32,20 triliun, diikuti kredit modal kerja sebesar 35,65% atau Rp27,48 triliun dan kredit investasi sebesar 22,58% atau Rp17,40 triliun (gambar 2). Dibandingkan triwulan sebelumnya, proporsi kredit investasi mengalami peningkatan 4,91%, sedangkan proporsi kredit konsumsi dan modal kerja mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,75% dan 4,16% dibanding periode sebelumnya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Hasil wawancara penelitian dengan Pejabat Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Sulawesi Selatan tanggal 5 September 2013.

**Tabel 6.** Pertumbuhan Tahunan Kredit/Pembiayaan Per Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan

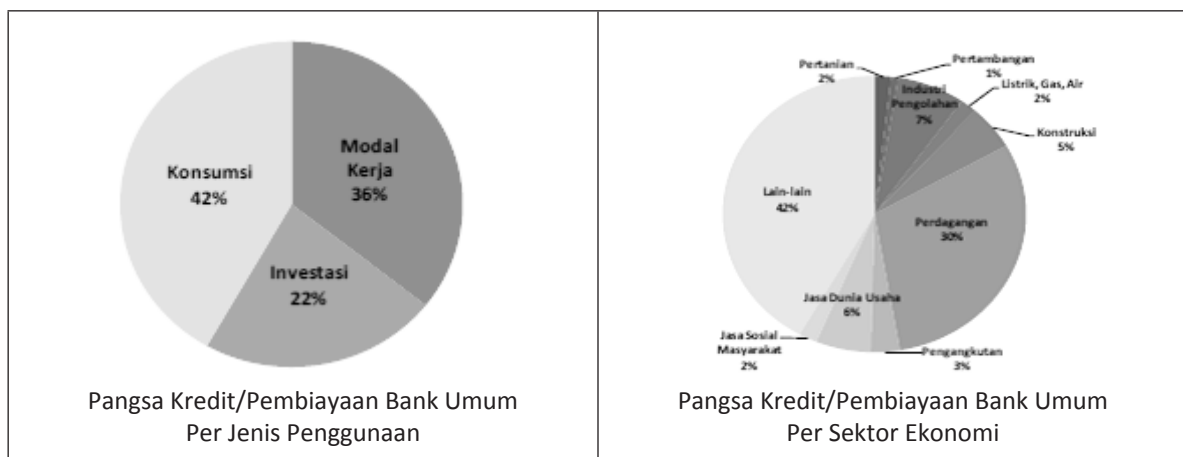
KOMPONEN	Pertumbuhan (yoy)				Nominal (Rp. Miliar)							
	2012				2013				2013			
	I	II	III	IV	I	II	I	II	III	IV	I	II
Kredit	26.30%	26.32%	22.49%	22.77%	22.58%	21.84%	58,755	63,265	65,412	69,956	72,019	77,083
Pertanian	76.99%	59.15%	46.48%	39.13%	55.44%	23.20%	883	1,101	1,146	1,187	1,373	1,356
Pertambangan	67.44%	45.71%	30.83%	0.11%	3.95%	-3.97%	568	608	626	564	590	584
Industri Pengolahan	30.85%	31.35%	32.65%	22.76%	26.31%	6.78%	4,842	5,216	5,381	6,013	6,116	5,570
Listrik, Gas, Air	-9.58%	47.94%	77.11%	116.37%	162.55%	223.27%	379	420	663	782	996	1,357
Konstruksi	9.70%	20.17%	18.74%	23.04%	21.81%	15.42%	3,148	3,503	3,708	3,848	3,835	4,043
Perdagangan	32.17%	33.66%	26.95%	26.32%	28.32%	28.77%	15,854	18,288	18,100	19,531	20,344	23,549
Pengangkutan	75.71%	42.76%	21.79%	22.66%	26.76%	31.52%	1,828	1,809	1,737	2,138	2,317	2,379
Jasa Dunia Usaha	64.12%	49.78%	27.60%	10.69%	8.66%	31.21%	3,171	3,438	3,474	3,371	3,446	4,511
Jasa Sosial Masyarakat	-6.02%	-7.96%	-16.66%	-11.48%	-6.57%	3.41%	1,583	1,465	1,376	1,386	1,479	1,515
Lain-lain	20.23%	19.37%	19.05%	22.77%	18.97%	17.51%	26,497	27,417	29,202	31,135	31,523	32,219

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Sulawesi Selatan, 2013

Tingginya pangsa kredit konsumsi tersebut, tercermin dari pangsa kredit lain-lain yang juga paling tinggi. Secara sektoral, penyaluran kredit pada triwulan II-2013 didominasi oleh 3 sektor yaitu sektor lain-lain, sektor perdagangan serta sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 41,80%, 30,55% dan 7,23% (lihat Gambar 2). Risiko kredit tetap terkendali dan lebih baik. Ditinjau dari aspek pengelolaan manajemen, risiko, kondisi perbankan Sulsel pada triwulan II-2012 masih menunjukkan performa yang semakin baik, tercermin dari rasio *Non Performing Loans* (NPLs) atau yang lebih umum disebut kredit macet Bank Umum yang masih terjaga pada level yang aman (dibawah 5%), yaitu sebesar 2,68%, dan cenderung menurun dari periode sebelumnya sebesar 2,84% (Tabel 7). Sedangkan profil risiko kredit skala kecil beberapa sektor primer terlihat cenderung meningkat karena

pertambangan tercatat masing-masing sebesar 12,66% dan 11,93%. Selanjutnya sektor jasa sosial masyarakat sebesar 4,10%.<sup>23</sup> (Lihat Gambar 3)

Sedangkan profil risiko kredit skala kecil beberapa sektor primer terlihat cenderung meningkat karena terjadinya pergeseran musim panen sehingga pola tanam relatif terganggu. NPL sektor primer yang masih tinggi antara lain sektor pertanian dan sektor pertambangan tercatat masing-masing sebesar 12,66% dan 11,93%. Selanjutnya sektor jasa sosial masyarakat sebesar 4,10%. Perlu dijelaskan bahwa tingginya kredit macet pada sektor pertanian dan perikanan mengingat sektor ini kegiatan usaha sangat terkait dengan kondisi alam yang tidak dapat terduga. Banyak para petani maupun nelayan mengalami kerugian akibat tidak memperoleh hasil atau gagal panen. Demikian pula para pelaku usaha sektor perikanan laut atau darat mengalami kerugian

**Gambar 2.** Pangsa Kredit/Pembiayaan Bank Umum per Jenis penggunaan dan Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Sulawesi Selatan, 2013.

terjadinya pergeseran musim panen sehingga pola tanam relatif terganggu. NPL sektor primer yang masih tinggi antara lain sektor pertanian dan sektor

akibat tidak memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Akibatnya, para pelaku UKM sektor ini

<sup>23</sup> *Ibid.*

Tabel 7. Perkembangan *Non-Performing Loans* (NPLs) Gross Bank Umum

KOMPONEN	2011				2012				2013	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
NPLs Gross (%)	3.25%	3.36%	3.22%	2.63%	2.82%	2.88%	2.65%	2.64%	2.84%	2.68%

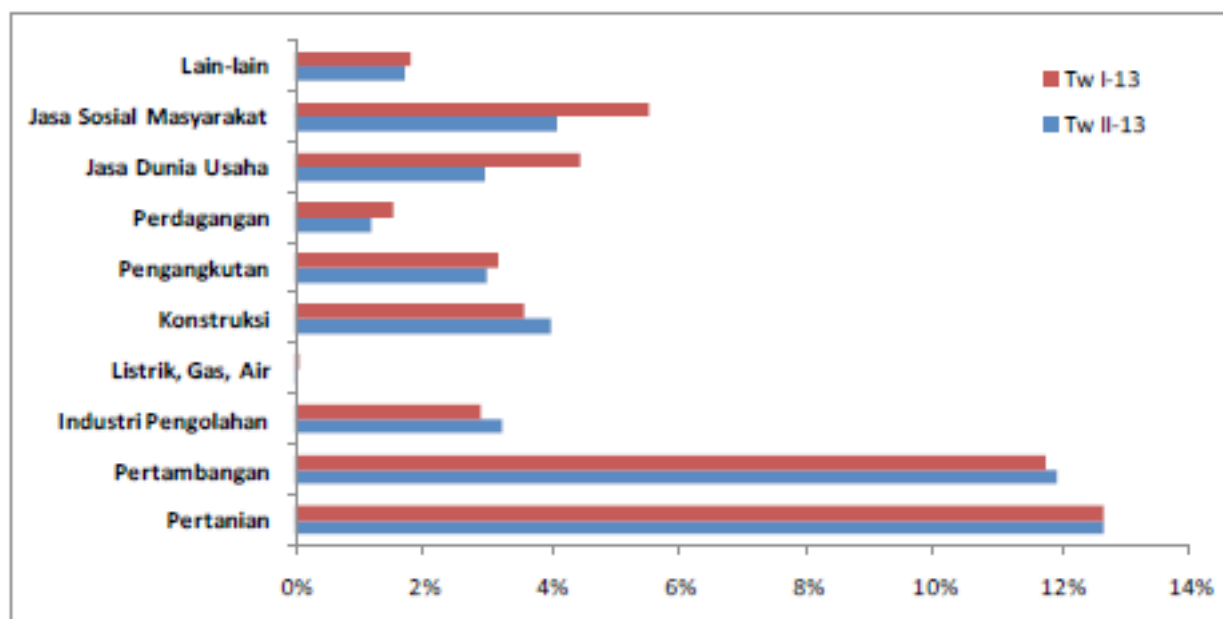
Sumber: Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Tahun 2013.

tidak dapat membayar kredit atau pinjaman<sup>24</sup> (Lihat Gambar 3)

#### 4. Realisasi Program KUR dan Permasalahannya

Penyaluran kredit UMKM terhadap total kredit di Sulawesi Selatan sebesar 30,08%, atau berada di atas kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 20%. Apabila dilihat pangsa kredit/pembiayaan MKM per sektor ekonomi pada posisi

yang dijamin dimana pada tahun 2008 Rp2.533.753 juta dan meningkat drastis hingga mencapai Rp22.798.471 juta. Dengan semakin meningkatnya penjamin tersebut, berimplikasi terhadap UKM sebagai debitur mengalami peningkatan jumlah yang pada tahun 2008 sebanyak 184.009, menjadi 1.148.3777 pada tahun 2012. Dengan demikian secara akumulasi, UMKM sebagai debitur telah mencapai 3.137.156 pada tahun 2012. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kenaikan nilai penjaminan

Gambar 3. *Non-Performing Loans* Per Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan

Sumber: Bank Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, Tahun 2013.

Juni 2013 sebagian besar masih didominasi oleh sektor perdagangan 62,24%, diikuti oleh sektor jasa dunia usaha, sektor konstruksi, industri pengolahan dan sektor pengangkutan yang masing-masing memiliki proporsi sebesar 7,95%, 6,33%, 6,09% dan 5,97% (grafik 3.6). Penyaluran kredit/pembiayaan UKM secara tahunan menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 16,18% (yoy) yang sebelumnya tumbuh sebesar 20,83% (yoy). Berdasarkan segmentasi skala usaha debitur, kredit/pembiayaan mikro, kecil dan menengah tercatat sebesar 29,06% dari total kredit/pembiayaan Bank Umum di Sulawesi Selatan.<sup>25</sup>

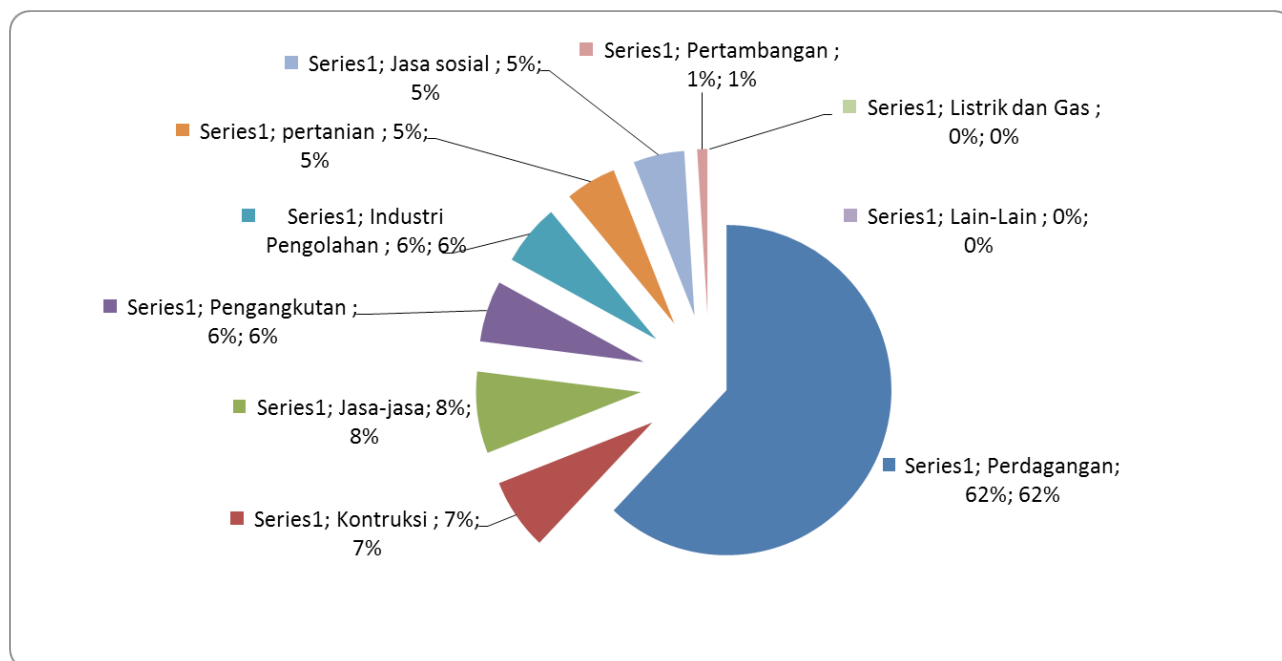
Dalam implementasi kebijakan KUR, PT Jamkrindo sebagai penjamin menunjukkan peningkatan *plafond* KUR

akan meningkatkan jumlah debitur yang memanfaatkan KUR akan semakin meningkat jumlahnya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengembangkan usahanya. (Lihat Tabel 8).

Pelaksanaan KUR selama ini di Sulawesi Selatan dilakukan melalui penjaminan PT. Askrido dan Perum. Jamkrindo yang berlaku secara nasional. Lembaga penjamin kredit daerah sendiri (lokal) saat ini belum ada yang beroperasi (masih dalam proses inisiasi). Selama ini kerjasama penjaminan antara bank penyalur KUR dengan lembaga penjamin berjalan dengan cukup baik. Kendala yang ditemui, kadang terungkap dalam pertemuan di forum-forum, seperti pihak penjamin mengeluhkan tingginya *claim* atas *Non-Performing Loan* (NPL), pada kredit yang diberikan tanpa agunan. Sedangkan dari sisi UMKM kendala yang ada adalah ketidakmampuan memenuhi persyaratan agunan atau *collateral*. Begitu juga dari

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan pejabat Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, 4 Juli 2013.

**Gambar 4.** Pangsa Kredit/Pembiayaan MKM Bank Umum Per Sektor Ekonomi, di Sulawesi Selatan, 2013.

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Sulawesi Selatan, 2013.

pihak bank penyalur, dimana mereka merasa kesulitan menemukan UMKM yang layak usaha dan memenuhi semua kriteria perbankan. Artinya secara umum KUR telah cukup banyak diakses oleh UMKM.<sup>26</sup>

Dari data Bank Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan untuk tahun 2012, KUR di

Program KUR sangat baik untuk dijadikan sebagai sarana untuk pemberdayaan UMKM dari sisi *access to finance*, karena pada dasarnya KUR meringankan syarat UMKM untuk mengakses kredit, misalnya dari sisi lama/waktu usaha, pada kredit komersil mensyaratkan usaha berjalan minimal 2 (dua) tahun

**Tabel 8.** Kinerja Penjaminan KUR PT. Jamkrindo, 5 (lima) Tahun Terakhir (2008 – 2012)

Keterangan	Realisasi (JutaR upiah)				
	Desember 2008	Desember 2009	Desember 2010	Desember 2011	Desember 2012
Plafond KUR Yang Dijamin Periode Tahun Berjalan	2,533,753	1,371,755	6,663,845	20,220,000	22,798,471
Akumulasi Plafond KUR yang dijamin	2,533,753	3,905,508	10,569,353	30,789,353	53,587,690
UMKM (debitur) Yang Dijamin Periode Tahun Berjalan	184,009	173,778	685,571	1,119,242	1.148.377
Akumulasi UMKM (debitur) yang Dijamin	184,009	357,787	1,043,358	2,162,600	3.137.156

Sumber: Perum Jamkrindo Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

Sulsel diakses sebanyak 397.650 UMKM dengan total kredit KUR sebesar Rp4,9 Triliun, Ini menempatkan Sulsel pada peringkat keempat realisasi KUR secara nasional. Secara internal dari UMKM yang didampingi, KUR cukup efektif untuk membantu UMKM khususnya yang berada pada level usaha mikro (dari 5 juta hingga 100 juta rupiah).<sup>27</sup>

sedangkan pada kredit KUR cukup 6 bulan berjalan. Selain itu dari sisi jaminan/*collateral* dimana pada kredit komersil pada umumnya mensyaratkan nilai pinjaman maksimal hanya 75-80% dari nilai agunan (itupun pada agunan tidak bergerak seperti tanah dan bangunan), sedangkan pada KUR jaminan bisa diringankan seperti BPKB motor untuk kredit mikro dibawah 20 juta. KUR perlu ditingkatkan untuk merangsang tumbuh kembang usaha, bahkan kalau perlu lebih dimudahkan dalam penyalurannya khususnya pada usaha sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Perbankan perlu

<sup>26</sup> Rangkuman dari hasil wawancara dengan Pejabat PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo Sulawesi Selatan, tanggal 4 Juli 2013.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Pejabat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 4 Juli 2013.

menghilangkan *stigma* dan trauma perbankan pada sektor-sektor tersebut agar semakin banyak masyarakat di pedesaan yang dapat mengakses KUR. Selain itu, diperlukan Lembaga/Perusahaan Penjamin Kredit Daerah agar kebijakan KUR bisa lebih dimudahkan.<sup>28</sup>

sosialisasi program-program pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan Bank Indonesia, penjelasan Sistem Informasi Debitur (SID), dan lain-lain. Selain edukasi, LPUMKM SULSEL juga mendampingi dan memfasilitasi UMKM untuk mengakses kredit kepada perbankan dimana seluruh UMKM yang

**Tabel 9.** Non Performing Garanty KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sampai Mei 2013

No	Bank Penyalur KUR	Plafond Kredit	Klaim yang Diajukan	Klaim yang Disetujui	NPG*) (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
a	b	c	d	e	f = e/c
1	BRI	255.748.946.783	155.012.613.596	106.156.152.623	41,51%
2	MANDIRI	14.215.000.000	10.031.440.356	5.615.853.529	39,51%
3	BNI	24.651.000.000	18.895.172.370	1.770.026.051	7,18%
4	BTN	986.850.000	720.012.911	680.216.743	68,93%
5	BTN SYARIAH	650.000.000	423.998.009	409.352.445	62,98%
6	BUKOPIN	1.880.000.000	979.667.033	726.605.429	38,65%
7	BSM	40.000.000	18.671.113	-	0,00%
TOTAL		298.171.796.783	186.081.575.388	115.358.206.820	38,69%

Sumber: PT.Jamkrindo Cabang Provinsi Sulawesi Selatan, 2013

Keterangan: \*)Non-Performing Garanty

Adanya penjaminan pihak ketiga akan semakin membantu mempermudah aksesibilitas KUR pada UMKM, karena perbankan membutuhkan dukungan tambahan untuk dapat lebih yakin dengan kredit yang mereka salurkan. Hal-hal yang perlu diatur pada program KUR adalah penjaminan, dimana dengan pemberian kredit tanpa agunan hal ini tidak mendidik UMKM untuk bertanggung jawab pada kreditnya. Jaminan agunan/*collateral* juga tetap dibutuhkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Lembaga perbankan penyalur KUR yang ada saat ini sudah cukup memadai, karena penyalur KUR didalamnya juga ada BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sulsel yang keberadaannya cukup terjangkau hingga di Kabupaten/Kota bahkan pedesaan.<sup>29</sup>

LPUMKM SULSEL berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan dan proses perkreditan, juga tentang produk-produk kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), serta Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Selain itu, LPUMKM SULSEL juga memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengakses kredit, pembuatan proposal usaha dan *businessplan*, pembuatan laporan keuangan,

pernah berinteraksi dengan LPUMKM dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan intermediasi, fasilitasi mengakses kredit pada perbankan sepanjang usaha yang dilakukannya telah layak untuk mendapatkan kredit dari perbankan.<sup>30</sup>

Dalam pengenalan akses kredit oleh UMKM diawali dengan memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan kepada UMKM atau komunitas UMKM, pelatihan awal adalah pelatihan pengenalan perbankan dan proses perkreditan sebagai pelatihan dasar, selain itu UMKM diberi pelatihan lanjutan berupa pelatihan *businessplan* dan pembukuan UMKM, setelah itu melakukan kunjungan *on the spot* pada usaha-usaha yang mengusulkan kredit, apabila usahanya cukup layak maka akan mendapat rekomendasi kepada pihak perbankan untuk melihat lebih jauh kelayakan UMKM tersebut dari sisi perbankan. Pada umumnya, UMKM yang diajukan sesuai dengan persyaratan bank sehingga bank jarang menolak memberikan kredit pada UMKM yang didampingi. Sedangkan LPUMKM akan berperan sebagai lembaga edukasi pada UMKM dan juga lembaga pendamping pada UMKM untuk dapat melakukan akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya. KUR sendiri menjadi prioritas bagi LPUMKM Sulawesi selatan, dimana setiap UMKM meminta fasilitasi kredit maka yang pertama diajukan adalah KUR, kecuali bila UMKM

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

tersebut sudah tidak layak memperoleh KUR karena telah pernah mengakses kredit komersil sebelumnya.

Program KUR cukup membantu dalam merevitalisasi program pemberdayaan UMKM. Namun selain KUR, seharusnya masih ada level yang lebih rendah lagi yaitu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). PKBL/CSR ini seharusnya dikelola secara lebih profesional dan terbuka, tidak hanya menjadi tertutup dari perusahaan dan BUMN tetapi sudah harus lebih *accountable* dan dapat diakses publik. Hal ini penting sebab PKBL/CSR mensyaratkan akses bantuan permodalan yang lebih mudah dengan bunga yang lebih ringan dan sangat cocok untuk menumbuhkembangkan usaha baru. PKBL/CSR bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran kredit pada UMKM, dan pada UMKM yang telah lulus PKBL/CSR sudah harus direkomendasikan ke perbankan untuk naik kelas dengan mendapatkan kredit KUR atau *scheme* kredit mikro lainnya.<sup>31</sup>

Proses dan mekanisme KUR cukup mudah diakses oleh UMKM. Hanya saja memang selama ini terlalu banyak UMKM khususnya yang level mikro yang belum "layak bank" (*bankable*). Misalnya untuk usaha mikro yang masih baru belajar, produknya belum layak jual, pemasarannya masih sangat kurang, usaha masih berubah-ubah, lokasi usaha yang berpindah, domisili yang tidak tetap, usaha musiman (kadang ada, kadang hilang), usaha yang produknya bagus tetapi belum dipasarkan secara rutin, kapasitas usaha yang kecil (baru terjual beberapa buah produk perhari), usaha yang tidak terbukukan secara administratif, dan kendala-kendala lainnya. Sebenarnya banyak usaha-usaha mikro yang tidak meyakinkan pihak perbankan dalam memberikan kredit KUR. Hal ini yang menjadi masalah dalam penyaluran KUR itu sendiri. Masalah ini bukan hanya dari ketatnya persyaratan bank tetapi juga dari internal UMKM-nya sendiri dimana mereka memang belum sepenuhnya menjalankan usaha dengan baik.

Meskipun kerjasama secara tertulis belum pernah dilakukan antara LPUMKM dengan bank, tetapi secara informal telah terbangun komunikasi yang intensif dengan perbankan khususnya pada bagian kredit mikro. Bank-bank penyalur KUR cukup mengenal LPUMKM sehingga tanpa kerjasama tertulis pun, intermediasi tetap dapat dilakukan dengan baik. Saat ini, telah didirikan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) namun saat ini hanya berlokasi di Jakarta saja, dan belum membuka cabang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. LPDB sebenarnya dapat berperan dalam memberikan

bantuan permodalan dalam skala yang lebih mendasar sebelum mengakses perbankan. Selain itu, bantuan dana yang direncanakan kementerian BUMN dalam mengalihkan kepengurusan PKBL/CSR kepada lembaga profesional seperti PNM, Ventura, dan atau lembaga khusus. Sebaiknya pemerintah perlu menyatukan PKBL-BUMN dan CSR pada lembaga profesional, sehingga lebih transparan dan *accountable*. Sedangkan untuk UMKM memang diperlukan lembaga-lembaga pendamping seperti LPUMKM SULSEL yang dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM dalam hal akses pembiayaan kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya.<sup>32</sup>

Hal lain yang juga bisa menjadi alternatif solusi pada penyaluran KUR adalah dengan menggunakan pola *linkage* melalui lembaga-lembaga keuangan mikro dan atau melalui Koperasi. Selama ini Koperasi dan lembaga keuangan mikro bentukan program/masyarakat jumlahnya cukup banyak namun kurang pembinaan sehingga banyak yang mati suri. Seharusnya koperasi dan lembaga keuangan mikro tersebut dapat menjadi sarana untuk menyalurkan KUR dari perbankan, dengan demikian maka nasabah UMKM tidak lagi secara langsung mengakses KUR, tetapi cukup mengakses lembaga keuangan mikro yang ada di sekitarnya.

## B. Jawa Tengah

### 1. Kondisi Perekonomian

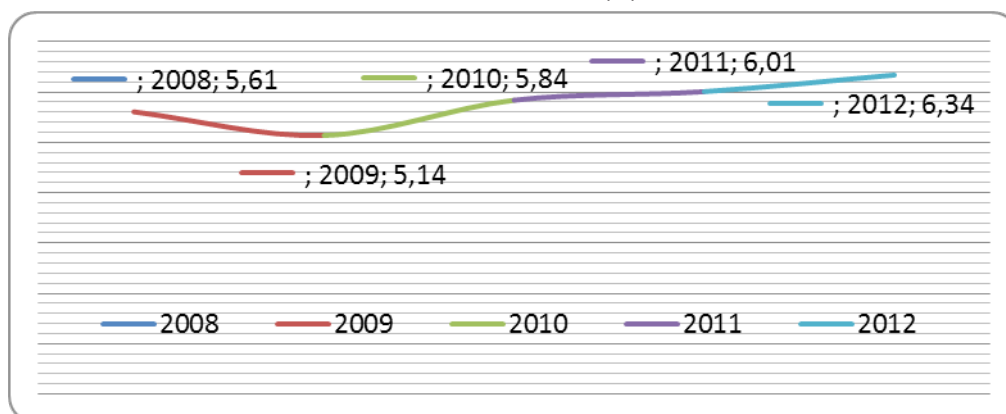
Laju pertumbuhan ekonomi (PDB) Jawa Tengah secara agregat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada 2009 mengalami penurunan 5,14%. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%, tahun 2010 (5,84%), meningkat menjadi 6,01% tahun 2011 dan 6,34% tahun 2012. Lihat Gambar 5.

Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan tiap sektor PDRB, maka laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 3 (tiga) sektor yaitu sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan sebesar 9,36%; perdagangan, hotel, dan restoran/warung makan sebesar 8,25%; dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,90%. Pertumbuhan cukup signifikan yang terjadi pada sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan merupakan gambaran dari perekonomian Jawa Tengah yang relatif stabil sehingga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran dipengaruhi oleh tingginya aktivitas perdagangan, distribusi barang beredar dan relatif stabilnya suku bunga perbankan. Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

**Gambar 5.** Perkembangan Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%)



Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, dan 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah.

masih cukup tingginya aktivitas kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, serta minat kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Pertumbuhan pada sektor jasa didorong oleh meningkatnya aktivitas berbagai *event*, kegiatan dan hiburan yang sejalan dengan semakin baiknya kesiapan industri jasa dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Secara lengkap, nilai dan laju PDRB Jawa Tengah tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel (10 dan 11). Sedangkan, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008 sebesar Rp367,135 Triliun meningkat menjadi Rp556,479 Triliun pada tahun 2012. Sedangkan Nilai PDRB atas

dasar harga konstan tahun 2008 sebesar Rp168,034 Triliun, meningkat menjadi Rp210,848 Triliun pada tahun 2012, (Lihat Tabel 10)

Apabila dilihat dari proporsi kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah tahun 2012, maka 3 (tiga) sektor memberikan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu industri pengolahan (32,83%); perdagangan, hotel dan restoran (20,29%); serta pertanian (18,74%). Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi PDRB selama dua tahun terakhir (2011-2012), maka telah terjadi pergeseran kontribusi sektor PDRB dimana 2 (dua) sektor mengalami penurunan yaitu pertanian dari 19,07% menjadi 18,74%; industri pengolahan dari 33,31% menjadi 32,83%. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan kontribusi

**Tabel 10.** Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah, Tahun 2008-2012 (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha	2009		2010		2011		2012		Triw-I 2013	
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
1. Pertanian	32,880	3,19	34,101	3,71	34,956	2,51	35,421	1,33	36,712	3,71
2. Pertambangan dan Penggalian	1,851	3,83	1,952	5,49	2,091	7,09	2,193	4,91	2,355	7,38
3. Industri Pengolahan	55,348	5,06	57,444	3,79	61,387	6,86	65,528	6,74	69,012	5,46
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,408	5,06	1,489	5,74	1,614	8,41	1,684	6,30	1,820	6,38
5. Konstruksi dan Bangunan	9,647	6,54	10,300	6,77	11,014	6,93	11,712	6,34	12,573	6,98
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	35,226	7,23	37,766	7,21	40,056	6,06	43,072	7,53	46,719	8,25
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,581	6,57	9,192	7,12	9,805	6,66	10,645	8,56	11,486	7,90
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6,218	7,81	6,701	7,78	7,038	5,02	7,503	6,62	8,206	9,36
9. Jasa-jasa	16,871	7,35	17,724	5,05	19,029	7,37	20,464	7,54	21,961	7,32
PDRB	168,034	5,61	176,673	5,14	186,995	5,84	198,226	6,01	210,848	6,34

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: \*) Angka Sementara; \*\*) Angka Sangat Sementara

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 19,71% menjadi 20,29%; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan dari 3,55% menjadi 3,59%; dan sektor jasa-jasa dari 10,60% menjadi 10,67%. Sementara untuk 4 (empat) sektor lainnya yaitu pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; pengangkutan dan komunikasi kontribusinya tetap.<sup>33</sup> Kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 dapat dilihat pada (tabel 11)

**Tabel 11.** Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Di Jawa Tengah, 2011-2012 (%)

Lapangan Usaha	2011**)	2012**)
1. Pertanian	19,07	18,74
2. Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,94
3. Industri Pengolahan	33,31	32,83
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,00	1,02
5. Konstruksi dan Bangunan	5,97	5,99
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	19,71	20,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,85	5,92
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3,55	3,59
9. Jasa-jasa	10,60	10,67
PDRB	100	100

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Jawa Tengah, 2013

Keterangan: \*\*) Angka Sangat Sementara

## 2. Akses Kredit Usaha Kecil

Penyaluran kredit bank umum di Jawa Tengah pada triwulan laporan mencapai Rp153,3 triliun, atau tumbuh sebesar 23,2% (yoy). Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut menunjukkan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih cukup baik. Menurut hasil Survei Kredit Perbankan (SKP) triwulan I 2013, faktor yang menyebabkan tingginya pencapaian realisasi penyaluran kredit pada triwulan I 2013 diantaranya disebabkan meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat, seiring dengan semakin kondusifnya kondisi perekonomian Jawa Tengah. Selain itu, juga dipengaruhi faktor suku bunga yang semakin kompetitif, dan proses pengajuan, serta pelayanan pencairan kredit yang semakin cepat.<sup>34</sup>

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi yaitu 30,0% (yoy) menjadi Rp19,9 triliun pada tahun 2013. Sementara jenis kredit lainnya, yaitu kredit

modal kerja dan kredit konsumsi juga masih tumbuh tinggi, masing-masing sebesar 21,1% (yoy) dan 24,0% (yoy). Secara nominal, sebagian besar penyaluran kredit di Jawa Tengah disalurkan untuk jenis kredit modal kerja yang mencapai Rp80,7 triliun (Lihat Grafik 6). Tingginya pertumbuhan kredit investasi juga terkonfirmasi dari SKP Triwulan I-2013 yang menyatakan bahwa pencapaian realisasi kredit untuk investasi pada Triwulan I-2013 melebihi target yang direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dengan rata-rata pencapaian 55,5% lebih tinggi dari target RKT.<sup>35</sup>

Dilihat dari pangsaanya, penyaluran kredit modal kerja di Jawa Tengah mencapai 52,7%, disusul oleh kredit konsumsi sebesar 34,2% dan kredit investasi sebesar 13,0%. Berdasarkan SKP Triwulan I 2013 terkonfirmasi bahwa perbankan masih memfokuskan penyaluran kreditnya untuk jenis kredit modal kerja terutama di sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan penyaluran kredit tersebut mayoritas disalurkan oleh bank persero dan bank swasta nasional porsi masing-masing sebesar 43,4% dan 42,4% dari keseluruhan kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Asing & Bank Campuran dalam penyaluran kredit perlu terus ditingkatkan.<sup>36</sup>

Perkembangan kredit UKM di Jawa Tengah meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Kredit UMKM pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 19,8% (yoy) sehingga menjadi Rp54,5 triliun. Pertumbuhan ini meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu 17,8% (yoy) dan 19,1% (yoy). Namun demikian, dari hasil SKP Triwulan I-2013 diketahui bahwa angka peningkatan kredit tersebut masih lebih rendah dari target RKT, terutama pada kredit modal kerja. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya menurunnya permintaan kredit dari UKM, kurangnya pemasaran/promosi terhadap produk kredit dan masih relatif tingginya tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Selain itu, faktor lain yang juga turut mempengaruhi tidak tercapainya target adalah hasil evaluasi terhadap pengajuan kredit/pembiayaan dari calon debitur.<sup>37</sup>

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan kredit kepada calon debitur diantaranya adalah kondisi kelayakan usaha, ketersediaan/kecukupan agunan dan rekam jejak calon debitur. Pertumbuhan kredit usaha kecil cukup memberikan sumbangan yang dominan terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Dengan

<sup>33</sup> BPS Provinsi Jawa Tengah.

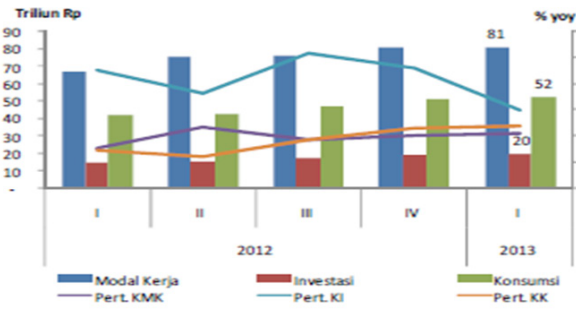
<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Bank Indonesia, Jawa Tengah, 2 September 2013.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

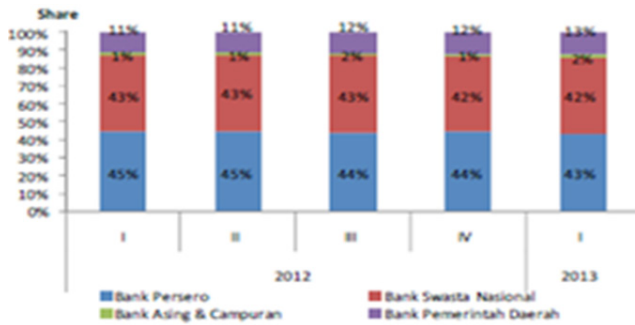
**Gambar 6.** Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan di Jawa Tengah



Sumber: DSM, Bank Indonesia

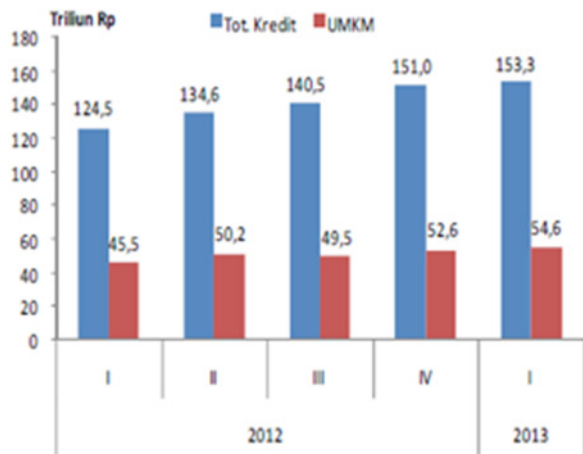
kontribusinya yang mencapai 35,6% dari total kredit bank umum di Jawa Tengah, peningkatan kredit perbankan sebesar Rp2,3 triliun, dimana Rp2,0 triliun berasal dari kredit usaha kecil (Lihat Gambar 8). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp46,0 triliun atau 84,4% dari kredit untuk usaha kecil merupakan kredit modal kerja, sisanya sebesar Rp8,5 triliun atau 15,6% merupakan kredit investasi (Lihat Gambar 9).

**Gambar 7.** Komposisi Bank Penyalur Kredit di Jawa Tengah



3.792.071 unit. Dalam rangka pengembangan UMKM tersebut diperlukan dukungan kredit. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran KUR. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari sebesar Rp1.955.330.404.158,00 pada Tahun 2008 menjadi sebesar Rp960.316.436.865,00 pada

**Gambar 8.** Perkembangan Kredit UMKM, dan Total Kredit

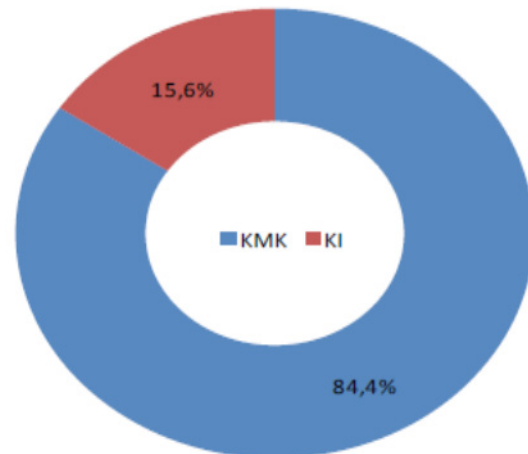


Sumber: Bank Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, 2013

**3. Realisasi Program KUR dan Permasalahannya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Indonesia Jawa tengah, dijelaskan realisasi program KUR di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Hingga akhir Juni 2009, secara nasional telah terealisasi KUR sebesar Rp14,88 triliun yang disalurkan kepada 2.025.087 debitur, sehingga rerata kredit per debitur sebesar Rp4,91 juta. Adapun di Jawa Tengah, telah terealisasi KUR sebanyak Rp2,1 triliun yang disalurkan kepada 430.437 debitur. Jawa Tengah merupakan propinsi dengan penyaluran KUR terbesar ke-2 setelah Jawa Timur, dengan persentase realisasi kredit sebesar 14%. Jumlah UKM di Jawa Tengah sampai dengan 2012 mencapai sebanyak

**Gambar 9.** Proporsi Kredit UMKM Menurut Jenis Penggunaan



Tahun 2012. Jumlah UMKM yang mengakses KUR juga meningkat dari sebanyak 367.553 UMKM menjadi 1.784.123 UMKM. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang disalurkan melalui 7 bank pelaksana (Tabel 13.)<sup>38</sup>

Namun demikian bahwa adanya anggapan di masyarakat yang memandang KUR merupakan kredit bantuan yang tidak perlu dikembalikan dan juga kredit tanpa agunan, menyebabkan integritas debitur untuk melunasi kewajibannya menjadi kurang baik. Disampaikan oleh bank pelaksana bahwa iklan layanan masyarakat yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UMKM,

<sup>38</sup> Ibid.

yang menyatakan bahwa KUR adalah kredit tanpa agunan, sangat meresahkan bank pelaksana karena telah menimbulkan anggapan masyarakat yang kurang baik terhadap bank pelaksana KUR. Terkait iklan tersebut, bank pelaksana menyarankan agar dibuat iklan untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa KUR bukanlah kredit bantuan yang tidak perlu dikembalikan dan juga bukan kredit tanpa agunan. Secara nasional, NPL KUR sebesar 5,60%. Hingga Juni 2009, PT.Askrindo Jawa Tengah & DIY melaporkan telah membayarkan klaim sebesar Rp6,5 miliar dari total klaim yang telah diajukan sebesar Rp18 miliar untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dari total klaim yang diajukan tersebut, tidak semuanya dilakukan pembayaran karena sebagian tidak memenuhi persyaratan teknis dan juga karena keterbatasan jumlah SDM untuk memeriksa klaim yang diajukan tersebut. Untuk wilayah Semarang besaran debitur KUR yang tidak dapat membayar KUR adalah sebesar 7,6% dari total debitur yang dijamin oleh PT Askrindo sejak tahun 2007 – Juli 2013 sejumlah 1.438.456 debitur atau sebesar 109.197 debitur yang telah mengajukan klaim dengan Plafond sebesar Rp390,884 Miliar.<sup>39</sup>

yang dapat disalurkan oleh Bank kepada setiap usaha kecil yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit adalah Kredit/Pembiayaan Baru dan/atau diberikan kepada Debitur Baru dan bukan kepada Debitur yang sedang menerima Kredit/ Pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *BI Checking* pada saat permohonan Kredit/ Pembiayaan diajukan. Ketentuan tersebut turut menyebabkan melambatnya pertumbuhan realisasi KUR, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank pelaksana mengusulkan agar kredit konsumsi seperti KPR dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor dikecualikan dalam kriteria calon nasabah yang sedang menikmati kredit dalam mengajukan KUR, karena jenis-jenis kredit tersebut merupakan kredit konsumsi yang dianggap mutlak diperlukan oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tinggal dan transportasi dalam melakukan usahanya.<sup>40</sup>

Bila melihat berbagai laporan perkembangan UMKM terutama terhadap akses kredit cukup menggembirakan. Namun demikian dalam usaha mencapai produktivitas dan daya saing yang tinggi dapat dicapai melalui operasi industri dan aktivitas-aktivitas penunjang yang strategik seperti pendidikan.

**Tabel 13.** Realisasi KUR menurut Bank Pelaksana Di Provinsi Jawa Tengah, 2008 – 2012

	BANK PELAKSANA	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		UMKM	REALISASI	UMKM	REALISASI	UMKM	REALISASI	UMKM	REALISASI	UMKM	REALISASI
1	BANK MANDIRI	112	30.035.089.130	134	32.955.578.260	466	94.753.078.260	844	256.804.121.630	2.019	507.154.121.630
2	BRI	365.270	1.636.399.129.400	471.710	2.084.642.024.893	902.047	3.873.897.521.800	1.177.574	5.348.223.321.900	1.510.391	8.379.574.423.11
3	BNI	1.698	177.418.970.835	1.730	182.652.060.835	4.578	273.538.163.800	13.897	5.348.223.321.900	60.779	1.300.668.773.279
4	BANK BUKOPIN	257	70.201.964.793	260	70.500.000.100	562	88.238.997.499	84	112.685.540.635	942	112.686.540.63
5	BANK SYARIAH MANDIRI	74	23.928.100.000	112	35.270.100.000	269	79.528.047.459	496	88.310.447.459	4.296	164.731.818.831
6	BTN	142	17.347.150.000	242	21.990.072.382	1.419	74.876.809.547	2.443	121.840.274.734	3.796	248.747.091.31
7	BANK JATENG	-	-	-	-	5.468	310.970.501.000	12.732	748.500.293.061	22.928	1.246.754.668.06
	JUMLAH	367.55	1.955.330.404.158	474.188	2.428.009.836.470	914.809	4.795.803.119.365	1.208.82	7.304.678.122.381	1.784.123	11.960.316.436.86

Sumber: Dinas Koperasi &UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2012.

Dalam implementasi program KUR di Jawa Tengah, masih menghadapi beberapa permasalahan. Sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap bank pelaksana KUR, Bank Indonesia melakukan pertemuan koordinasi bank pelaksana dan Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Bila melihat Addendum I MOU tanggal 14 Mei 2008, Pasal 2 ayat 8 yang menyebutkan bahwa, Kredit/Pembiayaan

Operasi industri, baik yang dijalankan oleh pelaku usaha skala mikro kecil, menengah (UMKM) maupun industri besar dan menengah merupakan penggerak roda perekonomian kerakyatan yang perlu didukung, dibina, dilindungi eksistensinya dan dikembangkan kapasitasnya.

Didasari kondisi nyata UMKM secara umum di Indonesia yang tertinggal jauh dari negara-negara

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan pengurus PT. Askrindo Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan DIY, 4 September 2013.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Pejabat Perum.Jamkrindo, Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan DIY, 4 September 2013.

Asia seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan maupun China, maka penguatan industri kecil dan pendidikan kewirausahaan guna meningkatkan kapasitas UMKM sangat diperlukan. Ketertinggalan ini utamanya dikarenakan oleh skala ekonomi UMKM yang kecil, rendahnya inovasi dan lemahnya jejaring. Di samping itu, secara generik permasalahan dalam pengembangan UMKM adalah rendahnya akses permodalan, bahan baku, informasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya biaya transaksi/usaha, penerapan teknologi yang rendah dan keterbatasan rantai nilai. Peningkatan kapasitas UMKM, baik dari sisi produksi, inovasi, maupun intelektual dan sosial properti dapat dilaksanakan secara terintegrasi melalui pengembangan UMKM berbasis Klaster.

Menurut asosiasi klaster Indonesia yang ada di provinsi Jawa Tengah, klaster adalah suatu kelompok usaha sejenis dalam suatu kawasan di mana saling berhubungan karena adanya kebersamaan dan sifat saling melengkapi. Model pendekatan klaster penting dalam peningkatan daya saing UMKM, karena melalui pendekatan klaster maka akan dapat diciptakan peningkatan daya saing industri melalui adanya pertalian diantara industri dengan lembaga terkait yang ada dalam pemusatan geografis. Klaster secara kelembagaan menjadi wadah pembinaan dalam suatu kelompok dengan bisnis industri tertentu yang memiliki kedekatan fungsional dan geografis. Pelaku UMKM dan berbagai stakeholder dalam klaster saling mendukung dan bersinergi untuk mengembangkan bisnis model bersama dengan peran dan fungsi masing-masing, seperti UMKM penyedia bahan baku, UMKM pengolah, UMKM jasa periklanan, UMKM jasa transportasi, dan lain sebagainya. Masing-masing elemen klaster merupakan fungsional yang saling terkait dan saling membutuhkan dalam menjalankan *core business* (bisnis utama).<sup>41</sup>

Dalam upaya meningkatkan peran sektor swasta dalam pembinaan dan pendampingan klaster usaha kecil, maka dibentuklah Asosiasi Klaster Indonesia (AKSI). AKSI merupakan perkumpulan klaster-klaster yang ada di Indonesia, dengan anggota seluruh para pelaku dalam pengembangan klaster baik UMKM, perusahaan besar, perguruan tinggi, aparat pemerintah maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan klaster. Aksi berangkat dari idealisme dan semangat anggotanya untuk terus maju, secara berkesinambungan mendukung peningkatan daya saing melalui klaster-klaster di Indonesia. Aksi

dibentuk atas prakarsa klaster-klaster yang ada di Jawa Tengah serta dukungan dari pimpinan daerah selaku Dewan Pengarah Aksi.<sup>42</sup>

Klaster UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jumlah UMKM pada tahun 2011 mencapai sekitar 52 juta dan menyumbang sekitar 60% dari PDB serta menampung 97% tenaga kerja. Sebagai pelaku aktif di sektor riil yang telah menopang perekonomian Indonesia, klaster perlu didukung oleh kebijakan nasional. Dalam jangka pendek, Aksi menargetkan adanya gerakan klaster sebagai gerakan nasional. Aksi juga akan memfasilitasi adanya '*Guidance Pengembangan Klaster*' serta akan terus mengadvokasi agar pengembangan klaster mendapat dukungan dari seluruh masyarakat termasuk Presiden melalui Inpres maupun dasar kebijakan lainnya.<sup>43</sup>

Di Jawa Tengah pada khususnya, terdapat sekitar 200 klaster potensial. Klaster-klaster tersebut terbentuk secara alami dan banyak juga yang dibentuk atas inisiasi pemerintah. Saat ini tercatat sebanyak 120 klaster yang telah menjadi anggota Aksi. Klaster-klaster di Jawa Tengah tersebut kerap dibina oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota bersama dengan FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) dan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) dan. Program FPESD dan FEDEP menitikberatkan pada pengembangan klaster di Jawa Tengah, meliputi klaster industri, pertanian dan pariwisata.

Namun, program pemerintah kerap memiliki kelemahan dalam kesinambungan program karena kebijakan birokrasi sangat dipengaruhi oleh *top manager*. Baik pimpinan pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kepala pemerintahan di daerah sering memiliki paradigma dan prioritas yang heterogen, sehingga peran swasta sebagai *intermediary* sangat dibutuhkan. Aksi yang berdiri tahun 2013 ini berusaha menjawab kebutuhan tersebut, sebagai organisasi sosial, independen yang konsen terhadap pengembangan klaster di Jawa Tengah dan Indonesia. Dengan adanya Aksi, harapannya pencapaian tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan klaster akan lebih cepat terwujud.<sup>44</sup>

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Perkembangan usaha kecil di kedua provinsi sangat terkait dengan kegiatan perekonomian

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus LSM Asosiasi Klaster Indonesia (Aksi), 4 September 2013.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

daerah tersebut. Karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu provinsi akan menjadi arah kegiatan usaha kecil. Sedangkan untuk pengembangan usaha kecil ditentukan pula oleh sektor-sektor pendukung lainnya. Melihat perkembangan usaha kecil pada provinsi Sulawesi Selatan di mana perekonomian masih ditopang oleh sektor pertanian serta sektor perdagangan yang merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian yang juga disusul oleh kegiatan sektor perdagangan dan retail. Sedangkan sektor pertanian menyumbang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB).

Dalam implementasi program KUR di kedua provinsi kurang lebih 5 tahun, masih menghadapi tantangan dilapangan. Namun disini jumlah KUR yang disalurkan oleh bank-bank BUMN terutama BRI, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahun sejak 2008-2013. Dari berbagai sumber disampaikan bahwa banyak usaha kecil yang menurut SKPD terkait layak untuk memperoleh KUR, namun banyak yang masih belum memperoleh fasilitas kredit tersebut. Kondisi ini bisa jadi sosialisasi kepada masyarakat masih kurang kepada pelaku usaha kecil sangat minim dan tidak rinci.

Dari sisi tingkat suku bunga sebenarnya program KUR ini perbedaannya tidak begitu jauh, hanya kelebihan program KUR adalah tidak diperlukannya jaminan bagi yang mengajukan kredit di bawah 5 juta, namun jaminan tetap diberlakukan untuk pinjaman di atasnya. Selain itu ada hal yang menarik bahwa kredit tersebut dijamin lembaga penjamin seperti Perum Jamkrindo dan PT Askkrindo dengan batasan yang telah ditentukan. Hal semacam ini tentunya perlu disosialisasikan bahwa kredit tersebut tidak akan ditanggung sepenuhnya bila terjadi permasalahan NPL atau kredit macet.

Dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi tersebut, KUR dalam realitanya masih sulit diakses oleh usaha kecil baik di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena bank penyalur mengimplementasikan peraturan sesuai dengan regulasi perbankan yang hati-hati (*prudent*). Hal ini wajar saja, mengingat dana untuk menjalankan program KUR merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, sehingga para bank penyalur harus menetapkan tingkat suku bunga yang sewajarnya. Program KUR dengan jumlah tertentu diberi asuransi kredit yang dijamin oleh PT Askkrindo dan/atau Perum. Jamkrindo yang dibayarkan oleh negara bila terjadi gagal bayar sesuai dengan realisasi di lapangan.

Di sisi lain kondisi ini sangat menyulitkan bank penyalur bila NPL atau kredit gagal bayar yang

tinggi akan mempengaruhi nilai standar pengolaan perbankan. Dalam realisasi klaim, keterlambatan pembayaran klaim dari lembaga penjamin dimana hal ini akan menjadi penilaian yang kurang baik dari otoritas pengawas perbankan dengan melihat perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan kredit yang gagal bayar. Kondisi ini masih mejadi permasalahan untuk kawasan Timur Indonesia, dimana lembaga penjamin harus melakukan verifikasi yang sangat jauh dan memakan waktu cukup lama. Selain itu ada indikasi bahwa bank penyalur sangat sulit untuk melakukan penagihan mengingat usaha kecil yang gagal bayar tersebut alamatnya tidak sesuai dengan yang diinformasikan pada awal pengajuan kredit.

Dalam aspek penyaluran, bank-bank penyalur masih sangat sulit menerapkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam program KUR. Hal ini karena adanya perbedaan antara regulasi program KUR yang terkait dengan permasalahan pengelolaan perbankan dengan beberapa ketentuan KUR yang pada tahap implementasinya sangat sulit. Namun bagi Bank BRI masih dapat melaksanakannya, mengingat inti kegiatan kreditnya memang ditujukan untuk masyarakat hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga dalam penyaluran dan penagihan bila terjadi permasalahan pembayaran dapat didekteksi oleh kantor kas pada tingkat wilayah yang lebih kecil. Sehingga wajar bila BRI dapat menyalurkan KUR dengan jumlah paling tinggi dibandingkan dengan bank-bank penyalur lain, seperti BPD di Sulawesi Selatan dan BPD Jawa Tengah.

## B. Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas KUR di kedua provinsi, maka akses kredit bagi pemberdayaan sektor riil dan usaha kecil, pemerintah dan bank pelaksana jangan hanya terpaku pada KUR, melainkan dengan lebih memberdayakan bank pelaksana karena bank pelaksana memiliki berbagai produk kredit yang ditujukan untuk usaha mikro. Hal ini tentunya bagi bank pelaksana atau bank apapun melakukan penelitian potensi dan usaha kecil yang dapat dikembangkan. Selain itu perlunya pemerintah fokus pada target usaha mikro yang belum *bankable* saja dalam menyalurkan KUR. Kemudian setelah menjadi *bankable* dan debitur tersebut mempunyai kinerja kredit yang baik, dapat direkomendasikan untuk diberi produk kredit reguler dari bank atau kredit lainnya (Non KUR).

Dalam menyamakan perbedaan pandangan dalam persyaratan yang memperoleh KUR sebaiknya dinas-dinas terkait usaha kecil dan

Industri perdagangan, bank-bank penyalur, otoritas pengawas bank dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat untuk usaha kecil dan asosiasinya, melakukan sinkronisasi kebijakan agar tidak timbul permasalahan pada saat implementasi. Kondisi ini sangat diperlukan mengingat banyak program-program semacam KUR hanya berlaku pada saat pemerintahan tertentu, sama halnya program KUR hanya dapat berjalan hingga tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gilarso. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Teguh Pudjo. (2001). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial (Cetakan Ke-3)*. Yogyakarta: BPFE.
- Sembiring, Sentosa. (2000). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siamat, Dahlan. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan* (Edisi ke 2), Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Triandaru, Sigit. & Santoso, Totok Budi. (2006). *Bank dan lembaga Keuangan lainnya* (Edisi 2), Jakarta: Salemba Empat.
- Wie, Thee Kian. (2010). *Perkembangan dan Kebijakan Usaha Kecil dan menengah di negara-negara Asia Tengah dan Relevansinya bagi Indonesia, Makalah Ilmiah pada PDII LIPI*.
- Bank Indonesia. (2013). *Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 2013*.
- Bank Indonesia. (2013). *Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan 2013*.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2013). *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2013*.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2013). *Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2012*.
- Provinsi Jawa Tengah. (2008). *RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013*.
- Provinsi Sulawesi Selatan. (2008). *RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Bank Indonesia. (2009). *Perkembangan KUR*, (*online*), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F6118BA1-4302-4BE9-B1F6-7A09EF39137B/14298/Boks2PerkembanganKUR.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2013)
- Bisnis Jateng. (2013). *Jateng: Selama April 2013 Realisasikan KUR Rp14 Triliun*, (*online*), (<http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/05/kur-jateng-jateng-selama-april-2013-realisasikan-kur-rp14-triliun/>, diakses tanggal 18 Juli 2013)
- Komite KUR. (2013). *Sebaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Periode November 2007-Desember 2012*, (*online*), (<http://komite-kur.com/article-71-.asp>, diakses tanggal 28 Maret 2013).
- Komite KUR. *Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat*, (*online*), ([http://komite-kur.com/maksud\\_tujuan.asp](http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp), diakses tanggal 25 Maret 2013).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2013). *Program KUR Lampau Target Kemenkop dan UKM Lakukan Pendampingan 430 Koperasi Seluruh Indonesia*, (*online*), ([http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1224:program-kur-lampau-target-kemenkop-dan-ukm-lakukan](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kur-lampau-target-kemenkop-dan-ukm-lakukan), diakses 13 February 2013)

### Jurnal/Makalah Ilmiah

- Alamsyah, Halim., dkk. (2005). *Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP)*, Maret.
- Putra, I Gusti Agung Alit Semara. & Saskara, I A. Nyoman. (2013). *Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar*, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 10.
- Soviana, Rurun Andika. (2012). *Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Edisi I.

- Kementerian Perdagangan. (2013). UMKM: Pilar Fundamental Perekonomian Nasional, (*online*) (<http://ditjenpdn.kemendag.go.id/index.php/public/information/articles-detail/kolom-anda/50>, diakses tanggal 5 April 2013)
- Purna, Ibnu. (2012). KUR Tumbuh Positif, Namun Masih Timpang, (*online*), (<http://www.setkab.go.id/artikel-5436-.html>, diakses Kamis, 23 Agustus 2012).